

**PROGRAM BIMBINGAN KONSELING PENGUATAN KESADARAN
MASYARAKAT BER Pancasila: STUDI KASUS DI DIREKTORAT
PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



oleh:

Tri Novi Purwaningrum
NIM. 20200012028

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam

Yogyakarta

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-760/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM BIMBINGAN KONSELING PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT BERPANCASILA: STUDI KASUS DI DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI NOVI PURWANINGRUM, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012028
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64e6bab587419



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 64e439c79661d



Penguji III

Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
SIGNED

Valid ID: 64e2510680da2



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e6bc2f7092c

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Novi Purwaningrum, S.E.
NIM : 20200012028
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES* (IIS)
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2023

Saya menyatakan



STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tri Novi Purwaningrum, S.E.
NIM 20200012028

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Novi Purwaningrum, S.E.
NIM : 20200012028
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES (IIS)*
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumber.

Yogyakarta, Juli 2023
Saya menyatakan



10000
REPUBLIC OF INDONESIA
SERI
00A15AKK.548428320

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Tri Novi Purwaningrum, S.E.
NIM 20200012028

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **PROGRAM BIMBINGAN KONSELING PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT BERPANCASILA: STUDI KASUS DI DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

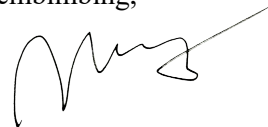
Yang ditulis oleh:

Nama : Tri Novi Purwaningrum, S.E
NIM : 20200012028
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A.)

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023
Pembimbing,



Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.

MOTTO

"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu Langkah"(Lao Tzu)

"Rahasia untuk maju adalah memulai." - Mark Twain



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan ibu, tetesan keringat, jerih payah dan doa mu yang selalu menyertai setiap langkahku. Dukunganmu adalah kekuatan bagiku untuk melangkah maju. Terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaranmu, tak pernah cukup ku membalas cintamu padaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Peran Polri Dalam Penguatan Kesadaran Masyarakat Berpancasila: Studi Kasus Di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., MA. selaku Direktur Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. Selaku Ketua Prodi Magister Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, arahan serta saran kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi. selaku dosen yang menguji yang telah menyediakan waktu, pikiran serta *supportnya* untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh dosen Pascarsarjana dan seluruh karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Para Senior dan rekan-rekan Polda D.I. Yogyakarta Mahasiswa Pascasarjana jurusan Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam tahun 2020/2021, yang selalu dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua Orang Tuaku, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil;
8. Anak-anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini;
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun selama penulisan dan penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023
Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Tri Novi Purwaningrum, S.E.
NIM. 20200012028

ABSTRAK

Tri Novi Purwaningrum, 20200012028. “Program Bimbingan Konseling Penguatan Kesadaran Masyarakat Berpancasila: Studi Kasus Di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ” Tesis Magister Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Penelitian ini untuk mengisi kekosongan tentang apa yang selama ini dianggap bahwa Polri memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, namun Polri juga dapat hadir dalam upaya pre-emptif untuk melakukan kesadaran kepada masyarakat berpancasila. Studi kasus yang diangkat dalam studi ini adalah Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penguatan kesadaran masyarakat berpancasila dan untuk mengeksplorasi peran yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan program Pembinaan Masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengungkap norma subyektif atas fenomena yang dilakukan narasumber berdasarkan realitas yang ada. Selain itu, peneliti mencoba untuk membangun kepercayaan dengan narasumber penelitian untuk mengamati program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY. Dengan pendekatan observasi partisipatif, peneliti memungkinkan melakukan kerja lapangan secara intens sebagai upaya untuk mendalami semua data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Data yang dikumpulkan direncanakan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2022). Analisis data dilakukan secara bersamaan ketika proses penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis data setelah selesai pengumpulan data untuk memetakan coding data. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dengan merujuk pada pola Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini bertujuan untuk mengecek dan membandingkan data secara konsisten. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana temuan lapangan benar-benar representatif dengan kebutuhan eksplorasi data dalam penulisan laporan penelitian.

Peran Polri dalam penguatan kesadaran berpancasila didefinisikan ke dalam tiga aspek dasar, yaitu sebagai katalisator, negosiator, dan koordinator. Sebagai katalisator Polri mengupayakan edukasi sejak dini terkait informasi kejahatan jalanan dan pelanggaran hukum yang melawan nilai-nilai pancasila. Sebagai negosiator upaya yang dilakukan oleh Polri dengan menjadi penegak hukum yang profesional sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dan tanpa memihak baik individu maupun kelompok saat terjadi permasalahan. Sebagai koordinator Polri selalu melibatkan stakeholder lain maupun lembaga/ orsosmas/ kelompok untuk menyatukan perbedaan pendapat dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah. Ini sesuai dengan pendekatan Counseling Devepolment

yang fokus pada kemanusiaan (human effectiveness model) dengan menekankan peran dan hubungan (roles and relationship), perilaku menyelesaikan masalah (coping behaviors), dan tugas perkembangan (developmental tasks).

**Kata Kunci : Peran Polri, Kesadaran Masyarakat Berpancasila, Ditbinmas Polda
DIY**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Pengumpulan Data.....	10
3. Analisis Data.....	12
4. Validitas Data	14
F. Kerangka Teori	14
1. Hakikat dan Urgensi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling..	15
2. Peran Konselo dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling.	18
3. Hubungan Konselor dan Konseli dalam Proses Bimbingan dan Konseling.....	20
4. Counseling Psychology: Prevention-Based	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	28
A. Pendahuluan.....	28
B. Sejarah, Visi, Misi. Kedudukan & Fungsi	28
C. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polri	36
BAB III PROGRAM PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT BERPANCASILA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	46
A. Pendahuluan.....	46
B. Bentuk-Bentuk Pembinaan Masyarakat oleh Ditbinmas DIY	49
1. Program kegiatan Sinau Pancasila bersama dengan Pemda	49
2. Program Pembinaan dan Penyuluhan di Lembaga Pendidikan.....	52
3. Program Pembinaan dan Koordinasi Antar Elemen Masyarakat	61

4. Penyebaran Pamflet dan Pemasangan Spanduk.....	73
5. Program Razia dan Patroli Ditbinmas Polda DIY	73
C. Peran Polri Dalam Program Penguatan Kesadaran Masyarakat Berpancasila.....	77
BAB IV COUNSELING PSYCHOLOGY PREVENTION-BASED : PENGUATAN KESADARAN BERPANCASILA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA DIY	80
A. Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polri	80
B. Implementasi Counseling Psychology Prevention-Based oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda DIY Melalui Penguatan Kesadaran Berpancasila	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan dan konseling telah berkembang menjadi diskursus yang dinamis. Diskursus tersebut terus mengalami perdebatan seperti dalam pendidikan, sosial, budaya, dan psikologi.¹ Pada instrumen pendidikan, bimbingan dan konseling memiliki peran dalam manajemen organisasi, menyelesaikan kasus peserta didik, perkembangan peserta didik, bimbingan karir, konseling individu, dan lainnya. Begitu juga dalam aspek sosial, bimbingan konseling berperan sebagai nilai intrinsik bagi seorang konselor untuk menghadapi dan menyelesaikan pelbagai kasus individu dan kelompok melalui pendekatan psikologi sosial.² Pada aspek budaya, bimbingan konseling telah lama dipraktikkan oleh *change makers* dalam menyelesaikan kasus-kasus insitusi sosial melalui pendekatan konseling lintas budaya.³ Hal yang paling penting adalah unsur psikologi yang menjadi domain konsep dalam proses bimbingan dan konseling terhadap individu, keluarga, kelompok, hingga organisasi. Atas dasar tersebut, varian atas diskursus bimbingan konseling juga bermetamorfosis yang tidak hanya mengatasi masalah yang bersifat

¹ Hermawati, "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga Di Era Industri," *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 9, no. 1 (2018): 26–38.

² Uslarika Hida Rahma, Cholichul Hadi, and Ilham Nur Alfian, "Appreciative Inquiry Untuk Meningkatkan Sense of Community Dan Partisipasi Pada Anggota Komunitas Ikatan Pemuda Pemudi Kampung Tengah Di Sumbermanjingkulon," *Jurnal Psikologi TALENTA* 6, no. 2 (2021): 36–54.

³ Robert Setio, "Inter-Religious Studies in Indonesia With Reference to ICRS," *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 1, no. 2 (2021): 116–127.

profesi guru, namun juga berkembang cakupannya ke profesi bonafit yang lebih luas, misalnya profesi Polri.⁴

Sebagai varian yang terus berkembang, peran bimbingan konseling terus bergumul dan bertransmisi ke area yang lebih luas. Ini merupakan nilai positif bagi peran bimbingan konseling yang terus berkembang ke arah yang lebih besar. Misalnya, masyarakat Indonesia adalah fenomena sosial yang tidak semata-mata menjadi entitas sosial, namun memiliki nilai intrinsik ketika mereka menjadi warga negara. Namun demikian, sebagai bangsa plural dan multikultur, tidak semua masyarakatnya memiliki kesadaran yang sama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Apabila itu diimplementasikan secara bijak, tentu kita tidak akan menjumpai beragam masalah sosial yang melanggar aturan baik hukum maupun norma adat. Di era kontemporer, masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin *absurd*. Hal ini terjadi karena norma dan etika sosial belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap individu. Kasus tawuran antar pelajar, klitih, narkoba, pelecehan seksual, pencurian, pemerkosaan, dan beragam jenis lain yang melanggar norma hukum negara, adalah bukti konkrit bahwa masyarakat masih banyak yang belum menyadari peran dan fungsi mereka di kehidupan sosial.

Realitas sosial semakin menunjukkan sebuah ketidakpastian untuk menjadikan bangsa yang aman, damai, dan tentram kerap disebut sebagai patologi sosial. Padahal bangsa Indonesia telah mengakui Pancasila sebagai pedoman atau *way of life* dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, makna dan gagasan Pancasila

⁴ Doyok Midarwanto, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian" (Universitas Airlangga, 2002).

belum mampu dijalankan secara optimal. Ada juga kasus-kasus lain yang menunjukkan sebuah dilema sosial, seperti orang beragama tapi masih melakukan keburukan.⁵ Untuk menertibkan masyarakat yang terdera oleh patologi sosial, Polri sebagai pangayom masyarakat hadir untuk mengamankan kasus-kasus tersebut. Dalam posisi ini, sebagaimana Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentang peran dan fungsi anggota Polri merepresentasikan bahwa Polri hadir di masyarakat sebagai anggota yang bertindak untuk mencegah kasus-kasus yang disebabkan oleh patologi sosial. Patologi sosial tersebut misalnya, kasus intoleransi, kekerasan, tawuran, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Polri dalam posisi tersebut, hadir sebagai langkah pre-emptif untuk mencegah masyarakat yang melanggar kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum.

Pada aspek yang lain, apabila Polri menemukan kasus-kasus yang mengarah kepada tindakan melawan Pancasila juga direspon untuk ditertibkan atas ketidakpatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum. Capaian dari program tersebut memiliki luaran untuk menertibkan masyarakat yang terjebak pada kasus-kasus patologi sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, Polda DIY misalnya, hadir dengan program *Sinau bareng Pancasila: NKRI dan Bela Negara*. Program ini muncul sebagai respon bahwa adanya ancaman, seperti klitih, narkoba, media sosial, yang terkait anak-anak remaja. Dalam kasus Klitih misalnya, ini diartikulasikan sebagai bentuk dari masyarakat yang tidak mengamalkan Pancasila

⁵ Sigit Hardiyanto and Elfi Syahri Romadhona, "Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja Di Kota Padangsidempuan)," *Jurnal Interaksi* 2, no. 1 (2018): 23–32.

sila ke dua, *kemanusiaan*. Di sisi lain, kasus intoleransi, paham radikal misalnya, jika audiennya pelajar akan lebih banyak kenakalan remaja, jika orang tua lebih kepada paham radikalisme (keagamaan). Dengan begitu, program tersebut lebih menekankan terhadap penguatan pembinaan dan sosialisasi Pancasila di masyarakat.

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah disebutkan, riset ini hadir untuk mengisi kekosongan tentang apa yang selama ini dianggap bahwa Polri memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, namun Polri juga dapat hadir dalam upaya pre-emptif untuk melakukan kesadaran kepada masyarakat berpancasila. Studi kasus yang diangkat dalam studi ini adalah Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian berikut ini:

1. Bagaimana program bimbingan konseling yang dilakukan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penguatan kesadaran masyarakat berpancasila?
2. Apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan program tersebut?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagaimana yang peneliti narasikan berikut ini:

1. Untuk menjelaskan program Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penguatan kesadaran masyarakat berpancasila.
2. Untuk mengeksplorasi peran yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan program Pembinaan Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelembagaan sehingga peneliti memetakan tiga signifikansi.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk mengisi kekurangan studi literatur tentang peran Polri dalam memperkuat kesadaran berpancasila.
2. Peneliti berharap studi ini dapat menjadi masukan bagi lembaga kepolisian dalam merumuskan kembali program kamtibmas sesuai dengan temuan dan fakta penting dalam penelitian yang ada.
3. Penelitian ini dapat digunakan dalam merancang program pembinaan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berpancasila dan penguatan ideologi negara. Secara spesifik, dapat menjadi acuan dalam proses bimbingan dan konseling ketika pendampingan dan pembinaan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Studi ini berangkat dari sebuah analisis bahwa masyarakat awam belum sepenuhnya mengenal tugas dan fungsi Polri dalam menjalankan program ketertiban masyarakat. Untuk itu, peneliti mencoba untuk mencari referensi terdahulu sebagai acuan untuk menemukan *gap knowledge* yang fokus pada program pendampingan sosial dalam penguatan kesadaran berpancasila.

Berdasarkan sebuah penelusuran kepustakaan, peneliti dapat memetakan kecenderungan studi yang ada menjadi empat isu yang berkembang.

Pertama, layanan bimbingan dan konseling terfokus pada pembinaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan tersebut terfokus pada penggalian masalah kebatinan individu, broken home, perceraian dengan suami, kurangnya dukungan keluarga, dan semua merupakan alternatif dalam efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Studi yang ada fokus pada bagaimana penanganan problematika kehidupan dapat diselesaikan di lembaga pemasyarakatan sehingga problem utama klien dalam proses bimbingan dapat teratasi. Selain itu, pemahaman dan pengalaman dari latar belakang masing-masing klien menunjukkan sebuah keunikan tersendiri dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling.⁶

Kedua, bimbingan dan konseling juga menjadi perhatian bagi sebagian peneliti dalam proses pelayanan bagi anak di lembaga pemasyarakatan. Studi yang ada lebih menekankan pada aspek keterbukaan diri dari para klien anak untuk mengeksplorasi masalah dan latar belakang mengapa mereka menjadi warga binaan lembaga pembinaan khusus anak. Remaja yang tidak seharusnya mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling di lembaga khusus anak, namun studi

⁶ Evisetiawati et al., "Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Perasyarakatan," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): 105–114; Siti Kulsum, "Peranan Bimbingan Dan Konseling Dalam Domain Pengembangan Diri Siswa 1," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 67–72.

menunjukkan bahwa adanya sebuah kesalahan dalam pola interaksi di lingkungan sehingga membuat mereka terjebak ke dalam patologi sosial.⁷

Ketiga, fenomena sosial dalam memasuki era normal baru pasca COVID-19 membuat beragam sektor terpukul, termasuk dalam pola pelayanan bimbingan dan konseling. Fenomena masyarakat yang frustrasi dalam menghadapi COVID-19 telah mengarah kepada tindakan abnormal dan terjerumus ke dalam patologi sosial. Hal ini membuat proses pelayanan bimbingan dan konseling dibutuhkan secara komprehensif agar tidak memunculkan isu perlawanan terhadap hukum. Oleh karena itu, proses bimbingan dan konseling untuk melakukan pembinaan di masyarakat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum seperti Polri.⁸

Keempat, proses restorative justice dalam pendampingan sosial bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling. Apalagi bagi anak yang berhadapan dengan hukum butuh pendampingan ekstra agar proses perkembangan mereka dapat berjalan optimal. Dalam posisi ini, seorang konselor harus mengutamakan advokasi litigasi maupun non-litigasi. Fokus utama seorang konselor pada aspek non-litigasi agar ketika

⁷ Zulamri Zulamri and M. Ahmad Juki, "Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pekanbaru," *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 19–36; Aisyah Ma'awiyah, "The Character of Adolescents in the North Aceh Coastal Area: An Impact of Authoritarian Parenting Style," *Jurnal Konseling Religi* 12, no. 2 (2021): 235–246; Radhiya Bustan, Liana Mailani, and Marsyela Novianti, "Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) to Parents of Street Kids at the Jakarta Rumah Alif Community Foundation," *Jurnal Konseling Religi* 12, no. 1 (2021): 126–141.

⁸ Masturin Masturin and Ahmad Nafi', "The Effectiveness of Guidance and Counseling Services in Schools in the New Normal Era," *Jurnal Konseling Religi* 13, no. 1 (2022): 157–176; Agus Supriyanto, "Islamic Guidance for Drug Addiction," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 4, no. 2 (June 30, 2016).

pengembangan kembali ke masyarakat dapat dilakukan secara kolaboratif dan konsisten.⁹

Dari beragam kecenderungan studi yang ada, penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih eksploratif tentang bagaimana peran Polri dalam penguatan kesadaran berpancasila agar masyarakat tidak terjebak kepada patologi sosial. Secara implisit, studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi lebih mendalam tentang program pembinaan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam proses transformasi sosial agar tidak terjebak kepada patologi sosial.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengeksplorasi program pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda DIY. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai penyelenggara dan pelaksana program pembinaan masyarakat yang memiliki beragam patologi sosial. Senada dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif program pembinaan bagi masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengeksplorasi program Polri dalam pembinaan kesadaran masyarakat berpancasila. Pendekatan ini dianggap mewakili sebuah fenomena empiris untuk mengetahui latar belakang

⁹ Fahmi Rafika Perdana, "Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak Di Badran Kota Yogyakarta," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 1 (May 31, 2019): 161–188; Zulamri and Juki, "Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru."

program pembinaan kesadaran masyarakat berpancasila. Dengan mengacu pandangan Yin, studi kasus merupakan pendekatan untuk mengetahui studi kasus dengan melihat hubungan dan interpretasi tentang data wawancara, observasi, maupun dokumen.¹⁰ Untuk itu, program pembinaan dan penyuluhan Ditbinmas Polda DIY tentang penguatan kesadaran berpancasila telah dijelaskan dengan pendekatan tersebut untuk mengeksplorasi berbagai makna atas fenomena yang muncul dan berkembang di lapangan.¹¹

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif, peneliti telah mengurai beragam fenomena patologi sosial yang terjadi di wilayah Yogyakarta seperti kejahatan jalanan, narkoba, dan pelanggaran hukum lain yang bertolakbelakang dengan Pancasila. Penelitian ini telah mampu mendeskripsikan proses pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY dengan menjawab dua rumusan masalah. Didukung dengan pendekatan *Counseling Psychology Prevention-Based*, peneliti mampu menganalisis fenomena patologi sosial yang terjadi dengan menghubungkan program pembinaan Ditbinmas Polda DIY. Oleh karena itu, penelitian ini merespon dengan pendekatan interpretatif untuk mengungkap norma subyektif atas fenomena yang dilakukan narasumber berdasarkan realitas yang ada.¹² Selain itu, peneliti mencoba untuk membangun

¹⁰ Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," *Qualitative Inquiry* 12, no. 2 (2006): 219–245; Robert K Yin, *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)* (SAGE Publications, 2014), 18.

¹¹ Teresa Moris, *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms* (USA, California: California University Press, 2006), 15-18.

¹² Velan Kunjuraman, "Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo," *Community Development Journal* 00, no. 00 (2021): 1–22; Yeunchul Kim, "New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science," *Journal of Asian Sociology* 48, no. 3 (2019): 343–358.

kepercayaan dengan narasumber penelitian untuk mengamati program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY. Dengan pendekatan observasi partisipatif, peneliti memungkinkan melakukan kerja lapangan secara intens sebagai upaya untuk mendalami semua data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

Upaya peneliti untuk membangun kepercayaan dengan informan akan mempermudah dalam melakukan wawancara sebagai salah satu sumber rujukan dalam penelitian tersebut. Ini memungkinkan informan akan memberikan informasi secara utuh dan empiris sesuai data lapangan dalam penelitian.¹³ Selain itu, peneliti menentukan informan mengacu kepada teknik *snowball sampling* setelah mendapatkan kepercayaan dengan informan. Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari sumber informasi secara lebih variatif.¹⁴

2. Pengumpulan Data

Peneliti direncanakan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2022) dengan beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengurus surat izin penelitian setelah selesai seminar proposal. Kedua, peneliti mengajukan izin ke bagian Kesbangpol DIY dan ke Polda DIY untuk mendapatkan persetujuan. Kegiatan ini merupakan langkah

¹³ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, "Introduction The Dicipline and Practice of Qualitative Research," in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2011), 11-12.

¹⁴ John W. Cresswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (California: SAGE Publications, 2003), 142.

dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan perizinan agar penelitian berjalan dengan lancar dan tidak terkendala oleh masalah teknis surat menyurat.

Ketiga, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Wawancara ini menggunakan teknik terstruktur untuk memudahkan arah kejelasan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber.¹⁵ Peneliti melakukan wawancara secara terbuka di kantor Polda DIY yang kemungkinan narasumber dapat memberikan informasi penting atas fenomena dalam studi penguatan kesadaran masyarakat berpancasila. Peneliti menjamin kerahasiaan data informan sehingga nama samaran (*anominitas*) digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menghabiskan waktu antara satu hingga satu setengah jam dalam proses wawancara dengan para narasumber. Hal ini sebagaimana acuan peneliti dengan menggunakan *snowball sampling* hingga data jenuh. Semua hasil wawancara ditranskripsikan sehingga memudahkan peneliti untuk mengkode data dari hasil verbatim wawancara.

Keempat, observasi partisipan dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti terlibat aktif dalam kegiatan di Ditbinmas Polda DIY. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara terbuka untuk mencatat dan mengumpulkan segala perilaku informan.¹⁶ Hasil observasi partisipan ini dicatat sehingga menjadi tambahan data untuk memperkuat wawancara tentang fenomena

¹⁵ Joseph A. Maxwell and L. Earle Reybold, *Qualitative Research, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Second Edi., vol. 19 (Elsevier, 2015), 72.

¹⁶ P Gill et al., "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups," *British Dental Journal* 204, no. 6 (2008): 291–295.

atas studi yang sedang dikaji. Untuk itu, observasi partisipan akan menjadi membantu pendalaman fenomena kasus yang diangkat dalam penelitian.

Kelima, dokumentasi merupakan langkah untuk memastikan sebuah narasi utuh bagi peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian. Dokumentasi ini juga membantu peneliti untuk membuktikan fakta empiris kerja lapangan. Maka dari itu, dokumentasi ini tidak hanya berupa foto-foto kegiatan penelitian, namun juga fakta dokumen lain yang berhubungan dengan fenomena tentang pendalaman makna etika profesi kepolisian.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data untuk memudahkan peneliti dalam menuliskan laporan penelitian. Analisis data ini dilakukan secara bersamaan ketika proses penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis data setelah selesai pengumpulan data untuk memetakan koding data. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dengan merujuk pada pola Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷

Pertama, peneliti melakukan analisis data secara reduksi. Proses ini dilakukan dengan mencatat, merangkum, memilah, dan memfokuskan hal-hal penting dari hasil wawancara yang ditranskripsikan. Data ini direduksi untuk memberikan gambaran secara jelas tentang makna atas fenomena yang dikaji dalam penelitian. Reduksi data mempermudah peneliti untuk mencari data selanjutnya.

¹⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (The USA: Sage Publications, 2014), 16-18.

Proses reduksi data dibantu dengan menggunakan alat elektronik. Semua hasil catatan lapangan, baik transkripsi wawancara ataupun fieldnote observasi, dirangkum dan diambil pokok penting sesuai dengan kebutuhan laporan penelitian. Untuk itu, kategorisasi data dari proses reduksi memungkinkan peneliti untuk membuang hal yang tidak penting dengan skema pengkodean.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data untuk mendapatkan informasi utuh terhadap data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Proses penyajian data bertujuan untuk menginterpretasikan data sehingga mudah dibaca oleh peneliti dan pembaca secara umum. Semua penyajian data didasarkan pada fenomena sosial yang kompleks dan dinamis sesuai dengan perkembangan penelitian lapangan.

Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan perolehan data yang bersifat sementara selama proses penelitian berlangsung. Proses ini dilakukan untuk mengkaji data secara berulang-ulang sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Proses ini juga dilakukan dengan bukti awal untuk mendukung validitas dan konsistensi data yang kredibel. Peneliti menggunakan dua proses penarikan kesimpulan, yaitu jawaban pertanyaan yang disampaikan informan secara tepat dan pernyataan informan yang dianggap tidak tepat. Dengan demikian, proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan temuan penelitian baru yang belum pernah ada dari studi sebelumnya.

4. Validitas Data

Setelah proses analisis data secara lengkap disusun, kemudian peneliti melakukan pemeriksaan data (keabsahan) dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.¹⁸ Teknik ini bertujuan untuk mengecek dan membandingkan data secara konsisten. Misalnya, peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan berbeda. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana temuan lapangan benar-benar representatif dengan kebutuhan eksplorasi data dalam penulisan laporan penelitian.

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan observasi untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kedua, peneliti membandingkan hasil transkripsi wawancara dengan membandingkan transkripsi wawancara dari informan yang berbeda. Ketiga, peneliti membandingkan transkripsi wawancara dengan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, tiga tahap ini saling berkaitkelindan antara sumber satu dengan yang lainnya.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan peta jalan dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi tentang kerangka acuan sebagai analisis framework. Ada tiga cakupan sebagai analisis framework penelitian ini: hakikat dan urgensi bimbingan konseling, peran konselor dalam bimbingan kemasyarakatan, dan hubungan antara konselor dan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 17-18.

konsel. Untuk memudahkan analisis tersebut, peneliti menjelaskan cakupan tersebut ke dalam sub-bab yang tersaji.

1. Hakikat dan Urgensi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Pada dasarnya, bimbingan konseling memiliki hakikat untuk memfasilitasi konseli agar mampu menyelesaikan persoalan kehidupan secara psikologis. Hakikat ini bertujuan untuk mencapai perkembangan secara fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual konseling dalam kehidupan sosial. Konseli merupakan individu yang memasuki fase kemandirian untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Mereka akan senantiasa menyelesaikan persoalan untuk mencapai kemandirian, ketahanan psikologis, hingga kesejahteraan immaterial. Untuk itu, perkembangan konseli secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sosial, gejala psikis, maupun perubahan perilaku. Pada posisi ini, konseli membutuhkan bimbingan dari konselor untuk menentukan arah perubahan individu yang dapat diintegrasikan kembali di lingkungan sosial.¹⁹

Iklm lingkungan yang sehat dapat menjadi sarana pemulihan konseli dalam menghadapi persoalan kehidupan secara psikologis. Namun tidak semua lingkungan tersebut dapat mendukung individu untuk beradaptasi dan akomodatif terhadap perkembangan dalam bersosialisasi dan diterima secara mudah. Ini terjadi karena perubahan struktur sosial yang mengikuti jaman dan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam tahap ini, lingkungan dipengaruhi secara tidak langsung oleh pertumbuhan penduduk, struktur demografi, tipologi kelas

¹⁹ Hadi Prayitno and Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 45-48.

sosial, struktur keluarga, dan perubahan dari masyarakat tradisional menjadi modern.²⁰ Misalnya, iklim lingkungan yang tidak sehat dengan maraknya perilaku masyarakat yang menyimpang dari kebanyakan perilaku positif. Kasus atas maraknya tayangan pornografi, penyalahgunaan kontrasepsi, minuman keras, drug, dan tindakan asusila merupakan beragam bentuk ketidaksehatan kondisi lingkungan masyarakat. Apabila konseli tidak mampu menghindari beragam kasus tersebut, akan sangat mudah terjebak ke dalam patologi sosial.²¹

Sebagai upaya untuk mencegah perilaku menyimpang dalam lingkungan sosial, dibutuhkan instrumen atau *tool* untuk mengubah konseli ke arah yang lebih baik. Pada titik ini, konselor harus hadir untuk mengembangkan potensi konseli secara sistematis dan terprogram sesuai dengan urgensi dan hakikat dari bimbingan konseling. Dengan merujuk pendekatan bimbingan dan konseling, peneliti mengkategorisasikan ke dalam paradigma oriented, remedial, klinis, terpusat pada konselor, dan langkah preventif. Paradigma oriented, konselor memiliki tugas untuk membimbing konseli dengan tujuan akhirnya tentang apa potensi yang dapat digali sehingga konseli menyelesaikan permasalahan individu dengan cakupan orientasi atau tujuan hidup. Paradigma remedial, konselor berfokus pada asas penyelesaian kasus secara berulang-ulang untuk menentukan arah tujuan konseli sampai menemukan apa yang dicita-citakan olehnya. Paradigma klinis, konselor berperan sebagai psikolog untuk menyelesaikan setiap perkara individu secara

²⁰ Berkat Persada Lase, "Posisi Dan Urgensi Bimbingan Konseling Dalam Praktik Pendidikan," *Jurnal Warta* 58 (2018).

²¹ Agus Supriyanto, "Islamic Guidance for Drug Addiction," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 98.

psikologis. Paradigma terpusat pada konselor, konseli dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian konselor mengarahkan dan membuka diskusi untuk menentukan arah pilihan. Paradigma preventif, konselor memiliki peran sebagai individu yang melakukan langkah-langkah pencegahan secara terintegrasi. Untuk itu, paradigma urgensi dan hakikat dalam diskursus bimbingan dan konseling ini menjadi acuan peneliti untuk memetakan kecenderungan dari peta masalah yang diangkat dalam studi yang ada.²²

Dalam pelaksanaannya, pendekatan dan paradigma sebagai acuan konselor menekankan kolaborasi antar stakeholders terkait. Hal ini sebagai upaya untuk memunculkan penyelesaian kasus secara integratif dan efisien. Secara integratif, konseli dapat menyelesaikan masalah setelah dibantu oleh konselor atas rekomendasi yang disarankan. Secara efisien, konselor tidak hanya terfokus untuk satu konseli namun ada upaya untuk melibatkan semua unsur dalam penyelesaian kasus. Atas dasar tersebut, implementasi bimbingan dan konseling di masyarakat harus mampu memfasilitasi perkembangan potensi konseli, meliputi aspek pribadi, sosial, lingkungan, karir, dan dimensi biopsikosospiritual: biologis, psikis, sosial, dan spiritual.²³

²² Umar Latif and Muhammad Syarif, "Urgensi Layanan Konseling Bagi Wanita Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2019): 21–36.

²³ Galang Surya Gumilang, *Pengembangan Dan Evaluasi Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik* (Malang: Azizah Publising, 2019), 24.

2. Peran Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Peran konselor dalam membina masyarakat yang terjebak patologi sosial memiliki cakupan yang cukup luas. Peneliti dapat merumuskan peran konselor menjadi empat fungsi: pemahaman, pemecahan, pembinaan, dan pengembangan. Fungsi pemahaman, konselor memiliki tugas sebagai individu dalam memahami dan mengenal lebih dekat konseli. Pengenalan sifat dan karakter konseli juga menjadi bagian dari fungsi tersebut, seperti sifat masalah, intensitas, konsekuensi, penyebab, dan potensi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh konseli. Fungsi pemecahan, konselor memiliki tugas sebagai pemecah masalah yang dihadapi konseli baik yang berat, sedang, maupun ringan. Fungsi pembinaan, konselor berperan sebagai individu untuk memecahkan masalah konseli dengan pendekatan rohani dan bimbingan mental. Fungsi pengembangan, konselor memiliki tugas untuk memecahkan masalah dengan memberikan alternatif pengembangan skill dan softskill agar konseli dapat beradaptasi di lingkungan sosial. Untuk itu, fungsi-fungsi tersebut memiliki korelasi dengan peran yang diemban oleh konselor dalam mendampingi dan membimbing konseli di lingkungan sosial.²⁴

Setelah mengenal fungsi tersebut, konselor harus menguasai beragam tahapan dalam proses bimbingan sosial. Setidaknya ada tiga tahap yang harus dilakukan oleh konselor: awal, tengah, dan akhir. Pada tahap awal, konselor melakukan upaya strategis untuk memastikan masalah yang dihadapi oleh konseli

²⁴ Irzum Fariyah, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Membangun Keberagamaan Anak Jalanan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2013): 145–164.

berjalan optimal dalam proses konseling, baik individual maupun kelompok. Proses ini memiliki tiga tahapan yang harus dikerjakan, yaitu konselor menentukan ketersediaan atas kebutuhan konseling, memperoleh secara utuh riwayat kasus, dan evaluasi psikodiagnostik atas kasus yang ditangani. Tahap tengah, konselor dituntut untuk menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Hal ini dilakukan untuk melatih konsentrasi dan kemampuan seorang konselor dalam memfasilitasi persoalan dihadapi konseli. Tahap akhir, konselor harus memiliki keterampilan dalam proses pembukaan konseling, perencanaan dalam penyelesaian kasus, mengevaluasi kasus, dan keterampilan penghentian konseling.²⁵ Tiga tahap ini menjadi bagian integral bagi konselor dalam menghadapi masalah konseli.

Untuk menguatkan peran konselor dalam memberikan pelayanan konseling, mereka harus mengutamakan tiga asas: kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Konselor harus mampu beradaptasi secara sukarela dalam menangani kasus sehingga masyarakat yang melakukan konseling tidak merasa terbebani. Selayaknya teman sebaya, konselor harus mampu menempatkan diri secara fleksibel, tidak menggurui, dan mencair dengan keadaan serta kondisi konseli. Selain itu, konselor harus menjaga asas keterbukaan sebagai bagian dari pelaksanaan konseling. Hal ini menjadi bagian dari proses adaptasi ketika seorang konselor secara sukarela membantu para konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, konselor juga dituntut untuk menjaga rahasia dari diri konseli. Bagian ini menjadi salah satu asas yang penting, agar konseli maupun klien

²⁵ Supriyanto, "Islamic Guidance for Drug Addiction," 98.

merasa dirinya terlindungi dan secara terbuka mereka akan mengeksplorasi masalah yang dihadapinya. Semua asas tersebut harus dilakukan dan menjadi acuan konselor terutama dalam menghadapi kasus yang rumit dan memberikan rasa empati tinggi bagi klien yang ditanganinya.²⁶

Untuk menjalankan peran konselor dalam proses konseling, mereka harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Komunikasi ini menjadi unsur dalam proses konseling bagi klien yang secara efektif dan transparan dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Komunikasi interpersonal ini memiliki makna yang positif selama proses konseling dilakukan secara terbuka, empati, positif, dan setara. Hal ini merupakan langkah yang cukup penting dalam menjalin komunikasi dengan konseli sehingga proses konseling dapat dilakukan secara fleksibel dan luas dalam menggambarkan pengalaman masalah yang dihadapi oleh klien.²⁷ Dengan demikian, efektivitas sebuah perencanaan konseling akan sangat ditentukan di awal bertemu dengan klien, dan mereka merasa bahwa kehadiran konselor dapat membantu masalah yang dihadapinya.

3. Hubungan Konselor dan Konseli dalam Proses Bimbingan dan Konseling

Hubungan konselor dengan konseli memiliki keterkaitan yang sangat erat. Konselor merupakan profesi yang menjalankan tugas untuk melakukan konseling terhadap individu atau personal yang menghadapi masalah. Sementara itu, konseli

²⁶ Billedy Saputro and Suwarjo Suwarjo, "Career Adventure Application Development to Increase Career Maturity in Adolescents," *Jurnal Konseling Religi* 9, no. 2 (2018): 70–85.

²⁷ Ani Nur Sayyidah, "Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Di Tempat Magang Kerja: Studi Deskriptif Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta," *Inklusi* 2, no. 1 (2015): 63–86.

atau klien merupakan individu yang membutuhkan pertolongan secara psikis untuk dapat menyelesaikan kasus yang dihadapinya.²⁸ Untuk itu, antara konselor dan konseli memiliki korelasi yang kuat dalam proses penyelesaian kasus personal dan psikis.

Dalam proses pelaksanaan, seorang konselor akan meminta konseli untuk menceritakan masalah yang dihadapi, dengan asas keterbukaan dan menjaga rahasia klien yang memang harus terlindungi. Sikap dan sifat klien berbeda-beda, dalam keadaan ini, konselor harus memiliki keterampilan secara profesional dalam mengungkap masalah yang dihadapi oleh klien. Secara terbuka, konselor harus menyampaikan tujuan, maksud, dan harapan klien dalam proses awal konseling.²⁹ Situasi ini dilakukan untuk memeriksa kelayakan sebuah proses konseling agar profesionalitas konselor dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan konseling harus dilakukan secara profesional dan menjaga kerahasiaan klien secara optimal.

Pelaksanaan konseling merupakan bagian dari pelayanan rehabilitasi sosial untuk mengembangkan kemampuan konseli agar mereka memperoleh nalar dalam penyelesaian kasus, penelaahan masalah yang dihadapi, perumusan dan pemecahan masalah. Berdasarkan pemahaman tersebut, konselor harus memahami permasalahan utama yang dihadapi konseli seperti masalah mental, kemandirian, kematangan, maupun pendampingan. Dengan adanya permasalahan yang

²⁸ Desi Alawiyah, Hayatul Khairul Rahmat, and Syahti Pernanda, "Menemukanali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 84–101.

²⁹ *Ibid.*

terpetakan, baik secara individu maupun kelompok, proses pelayanan bimbingan dan konseling menjadi sarana untuk membangun mental agar dapat menciptakan kondisi baru ke arah yang lebih positif. Proses ini disebut juga dengan pendekatan behavioral yang memandang setiap individu didekati dengan pandangan psikologis.³⁰

Pertama, konseling individu merupakan proses layanan bimbingan dan konseling dengan memberikan nasihat kepada orang lain secara individual dengan *face to face* atau kontak langsung. Dalam proses konseling individu ini membutuhkan pelibatan konselor paling tidak melalui tiga tahap: assesment atau pengenalan dan mengali permasalahan; mengali permasalahan lebih dalam dan memberikan perlakuan atas permasalahan; menentukan tindak lanjut dari permasalahan sosial dan melihat perkembangannya selama proses konseling berlangsung. Kedua, konseling kelompok merupakan proses pemecahan masalah yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dengan beberapa konseli disini terjadi hubungan konseling yang bersifat hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban; ada pengungkapan dan pemahaman masalah, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Secara khusus, tujuan konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab

³⁰ Kurnia Puspita Anggraeni, "Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Intimasi Pertemanan Pada Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2012," *E-Jurnal Bimbingan dan Konseling* 4, no. 5 (2015).

dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih.³¹

Tujuan dari proses pelayanan bimbingan dan konseling tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengaktualisasikan dan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki sesuai kemampuan konseli. Mereka mau membuka diri dan mengubah pandangannya. Dengan demikian proses konseling yang dilaksanakan dapat berjalan. Konseling behaviour menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani patologi sosial. Oleh karena itu konseling sangat diperlukan sebagai salah satu upaya pendampingan untuk mengubah persepsi baik dari segi mental maupun pola perilaku sehingga mengubah pola pikir ke arah positif.

4. *Counseling Psychology: Prevention-Based*

Penelitian tentang kegiatan pencegahan (*Preventif*) dalam dunia konseling maupun psikologi konseling telah menjadi perhatian oleh beberapa akademisi dan praktisi. Profesi konseling telah mereproduksi konsep pencegahan dengan mempublikasi lewat program konseling perguruan tinggi dan jaringan profesional. Salah satunya Goodyear dan Shaw yang mengangkat isu-isu tentang pencegahan dalam peraturan pendidikan dan masyarakat. Dua karyanya yang berjudul *Improving Counseling Thought Primary Prevention dan Primary Preventive Counseling: Empowering People and Systems* menyajikan sejarah, model

³¹ Hermawati, "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga Di Era Industri."

konseptual, dan penerapan pencegahan primer dalam konseling dan psikologi konseling.³²

Caplan dalam tulisannya mengkategorikan makna pencegahan (*Preventive*) menjadi pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang merujuk pada upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah insiden baru pada sebuah gangguan, menurunkan tingkat prevalensi suatu gangguan, atau mengurangi efek dan mengurangi gangguan yang muncul. Dalam studi konseling dan psikologi konseling, pencegahan merupakan apa yang didefinisikan oleh Caplan sebagai pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan melakukan upaya intervensi pencegahan yang dirancang untuk mengurangi kejadian, prevalensi, dan dampak dari masalah perilaku. Disamping itu memasukkan kesejahteraan pribadi dan prakarsa perubahan sosial dan politik untuk meningkatkan lingkungan tempat orang belajar, rumah dan bekerja.³³

Romano dan Hage mengkonseptualisasikan intervensi pencegahan memiliki 5 kategori yaitu,

- a. Menghentikan/ mencegah perilaku bermasalah yang pernah terjadi (*Stops /prevents a problem behavior from ever occurring*).
- b. Menunda timbulnya masalah perilaku (*Delays the onset of a problem behavior*).

³² John L. Romano, Sally M. Hage, "Prevention and Counseling Psychology: Revitalizing Commitments for the 21st Century", *E-Journal The Counseling Psychologist*, Vol. 28 No. 6 (2000)

³³ *Ibid.*, 739-740

- c. Mengurangi dampak dari perilaku bermasalah yang ada (*Reduces the impact of an existing problem behavior*).
- d. Memperkuat pengetahuan, sikap dan perilaku yang meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik (*Strengthens knowledge, attitudes, and behaviors that promote emotional and physical well-being*).
- e. Mendukung kebijakan kelembagaan, komunitas dan pemerintah yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional (*Supports institutional, community, and government policies that promote physical and emotional well-being*).

1, 2 dan 3 di atas dikonseptualisasikan dalam istilah pencegahan tradisional yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan kategori empat dan lima dikonseptualisasikan dalam kerangka pengurangan resiko (*risk-reduction*). Artinya strategi pengurangan resiko (*Risk-reduction strategies* (RRS) bermaksud untuk mengurangi karakteristik, variabel atau bahaya yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap sebuah gangguan ataupun memperkuat faktor yang melindungi atas gangguan tersebut. RRS secara empiris mampu diimplementasikan ke dalam tingkat individu, kelompok atau sistem yang dapat mengatasi variabel biologis, psikologis, sosial dan lingkungan.

Counseling Psychology Preventive-Based merupakan pendekatan altermatif dalam konseptualisasi praktik psikologis yang menekankan multikulturalisme,

intervensi sistemik dan kolaborasi interdisipliner. Empat tujuan utama *Counseling Psychology Preventive-Based* yaitu³⁴

- a. Penggunaan model sistemik dan integratif (*Greater use of systemic and integrative theoretical models and approaches*).
- b. Intervensi dini dengan anak dan remaja (*Increased emphasis on early preventive interventions with children and youth*).
- c. Isu ras, etnik dan keanekaragaman dalam pencegahan (*Prevention interventions that are sensitive to racial, ethnic, and other forms of diversity*).
- d. Bidang pelatihan, tujuan dan keterampilan yang mendukung ilmu dan praktik pencegahan (*Training domains, objectives, and skills that support the science and practice of prevention*).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang di dalamnya terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yaitu mendeskripsikan latarbelakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka teori.

Bab II : Peneliti menjelaskan profil Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda DIY

³⁴ *Ibid.*, 745-746

- Bab III : Bagian ini akan membahas tentang program penguatan kesadaran masyarakat berpancasila yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda DIY
- Bab IV : Bagian ini penulis mendeskripsikan Counseling Psychology Preventiion Based yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY untuk penguatan kesadaran berpancasila.
- BAB V : Bagian terakhir peneliti mendeskripsikan hasil kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian dan analisis secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi penguatan kesadaran berpancasila oleh Ditbinmas Polda DIY telah dilakukan melalui rangkaian program pembinaan dan penyuluhan yang melibatkan *multisektor-multiaktor* meliputi lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan desa dan instansi pemerintahan kabupaten/kota. Masih ditemukannya kasus kejahatan jalanan (klitih) dan pelanggaran hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditbinmas Polda DIY sebagai penanggungjawab tugas pembinaan dan penyuluhan dalam tubuh Polri mengupayakan tindakan preventif. Upaya preventif dilakukan dengan mengintervensi berbagai lapisan masyarakat melalui (1) Penyebaran pamflet dan spanduk; (2) Program pembinaan di lembaga pendidikan; (3) kegiatan patroli dan razia malam; dan (4) Koordinasi antar kelompok masyarakat.

Peran Polri dalam penguatan kesadaran berpancasila didefinisikan ke dalam tiga aspek dasar, yaitu sebagai katalisator, negosiator, dan koordinator. Sebagai katalisator Polri mengupayakan edukasi sejak dini terkait informasi kejahatan jalanan dan pelanggaran hukum yang melawan nilai-nilai pancasila. Sebagai negosiator upaya yang dilakukan oleh Polri dengan menjadi penegak hukum yang profesional sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dan tanpa memihak baik individu maupun kelompok saat terjadi permasalahan. Sebagai koordinator Polri selalu melibatkan *stakeholder* lain maupun lembaga/ orsosmas/ kelompok

untuk menyatukan perbedaan pendapat dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah.

Upaya preventif dan peran polri dalam memperkuat kesadaran berpancasila meletakkan hakikat dan urgensi bimbingan konseling melalui Ditbinmas memiliki posisi yang strategis untuk mempengaruhi kepribadian manusia dan memperkuat jaringan sosial di masyarakat. Ini sesuai dengan pendekatan *Counseling Development* yang fokus pada kemanusiaan (*human effectiveness model*) dengan menekankan peran dan hubungan (*roles and relationship*), perilaku menyelesaikan masalah (*coping behaviors*), dan tugas perkembangan (*developmental tasks*).

Atas dasar tersebut, program penguatan kesadaran berpancasila oleh Ditbinmas Polda DIY berdasarkan perspektif *Counseling Psychology Prevention-Based* telah terimplementasikan secara sistemik dan integratif. Secara sistemik Ditbinmas Polda DIY merekonstruksi sistem lingkungan bagi konseli agar mendukung dan memperkuat kompetensi dalam menegosiasikan sistem sosial yang berdampak pada penguatan pribadi maupun kelompok. Hal ini juga memberikan efek protektif untuk mampu mengatasi patologi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Sedangkan secara integratif, Ditbinmas Polda DIY telah mengakomodir peran, tugas, dan fungsi instansi/ lembaga/ kelompok untuk memberikan ruang aman dan mendukung konseli baik secara individu maupun kelompok dalam menanggulangi tindak kejahatan jalanan dan pelanggaran hukum yang melawan pancasila.

B. Saran

Kajian ini akhirnya sudah pada tahap saran, peneliti akan memberikan beberapa saran terkait penelitian yang telah diselesaikan dengan topik penguatan kesadaran berpancasila yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY dengan pendekatan *Counseling Psychology Prevention-Based*.

1. Penelitian tentang *Counseling Psychology Prevention-Based* masih jarang ditemukan dalam berbagai literatur, sehingga memungkinkan untuk peneliti lain ikut andil dalam mengkaji tentang topik tersebut.
2. Ditbinmas Polda DIY maupun Polri dalam mengatasi permasalahan kejahatan jalanan dan pelanggaran hukum yang melawan pancasila seperti ideologi radikalisme, terorisme dan intoleransi membutuhkan peningkatan dan *upgrade* model pendekatan preventif, karena sistem lingkungan yang semakin disruptif.
3. Penulis mengharapkan penelitian lebih lanjut terkait kajian dalam tesis ini, seperti menambahkan sumber informan yang lebih kompleks maupun menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan tingkat menurun ataupun meningkatnya pasca proses pembinaan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda DIY.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, Desi, Hayatul Khairul Rahmat, and Syahti Pernanda. "Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 84–101.
- Anggraeni, Kurnia Puspita. "Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Intimasi Pertemanan Pada Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2012." *E-Jurnal Bimbingan dan Konseling* 4, no. 5 (2015).
- Bustan, Radhiya, Liana Mailani, and Marsyela Novianti. "Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) to Parents of Street Kids at the Jakarta Rumah Alif Community Foundation." *Jurnal Konseling Religi* 12, no. 1 (2021): 126–141.
- Cresswell, John W. "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach." California: SAGE Publications, 2003.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. "Introduction The Dicipline and Practice of Qualitative Research." In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 1–19. 4th ed. California: SAGE Publications, 2011.
- Evisetiawati, Evisetiawati, Devi Aulia Tista, Eni Nurhasana, Resiana Putri, Erica Farichatin Aida, and Affan Yusra. "Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Permasalahatan." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): 105–114.
- Farihah, Irzum. "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Membangun Keberagaman Anak Jalanan." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2013): 145–164.
- Flyvbjerg, Bent. "Five Misunderstandings About Case-Study Research." *Qualitative Inquiry* 12, no. 2 (2006): 219–245.
- Gill, P, K Stewart, E Treasure, and B Chadwick. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups." *British Dental Journal* 204, no. 6 (2008): 291–295.
- Gumilang, Galang Surya. *Pengembangan Dan Evaluasi Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik*. Malang: Azizah Publising, 2019.
- Hardiyanto, Sigit, and Elfi Syahri Romadhona. "Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja Di Kota Padangsidimpuan)." *Jurnal Interaksi* 2, no. 1 (2018): 23–32.
- <https://id.wikipedia.org/wiki>. "Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta."

- Hermawati. "Perubahan Pola Kehidupan Keluarga Di Era Industri." *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 9, no. 1 (2018): 26–38.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Kim, Yeunchul. "New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science." *Journal of Asian Sociology* 48, no. 3 (2019): 343–358.
- Kulsum, Siti. "Peranan Bimbingan Dan Konseling Dalam Domain Pengembangan Diri Siswa 1." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 67–72.
- Kunjuraman, Velan. "Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo." *Community Development Journal* 00, no. 00 (2021): 1–22.
- Lase, Berkat Persada. "Posisi Dan Urgensi Bimbingan Konseling Dalam Praktik Pendidikan." *Jurnal Warta* 58 (2018).
- Lampiran XIX Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. "
- Latif, Umar, and Muhammad Syarif. "Urgensi Layanan Konseling Bagi Wanita Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2019): 21–36.
- Ma'awiyah, Aisyah. "The Character of Adolescents in the North Aceh Coastal Area: An Impact of Authoritarian Parenting Style." *Jurnal Konseling Religi* 12, no. 2 (2021): 235–246.
- Masturin, Masturin, and Ahmad Nafi'. "The Effectiveness of Guidance and Counseling Services in Schools in the New Normal Era." *Jurnal Konseling Religi* 13, no. 1 (2022): 157–176.
- Maxwell, Joseph A., and L. Earle Reybold. *Qualitative Research. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. Second Edi. Vol. 19. Elsevier, 2015.
- Midarwanto, Doyok. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian." Universitas Airlangga, 2002.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. 3rd ed. The USA: Sage Publications, 2014.
- Moris, Teresa. *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms*. USA, California: California University Press, 2006.
- Prayitno, Hadi, and Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Rafika Perdana, Fahmi. "Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui

- Program Kampung Ramah Anak Di Badran Kota Yogyakarta.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 1 (May 31, 2019): 161–188.
- Rahma, Uslarika Hida, Cholichul Hadi, and Ilham Nur Alfian. “Appreciative Inquiry Untuk Meningkatkan Sense of Community Dan Partisipasi Pada Anggota Komunitas Ikatan Pemuda Pemudi Kampung Tengah Di Sumbermanjingkulon.” *Jurnal Psikologi TALENTA* 6, no. 2 (2021): 36–54.
- Saputro, Billedy, and Suwarjo Suwarjo. “Career Adventure Application Development to Increase Career Maturity in Adolescents.” *Jurnal Konseling Religi* 9, no. 2 (2018): 70–85.
- Sayyidah, Ani Nur. “Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Di Tempat Magang Kerja: Studi Deskriptif Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.” *Inklusi* 2, no. 1 (2015): 63–86.
- Setio, Robert. “Inter-Religious Studies in Indonesia With Reference to ICRS.” *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 1, no. 2 (2021): 116–127.
- Supriyanto, Agus. “Islamic Guidance for Drug Addiction.” *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 98.
- Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)*. SAGE Publications, 2014.
- Zulamri, Zulamri, and M. Ahmad Juki. “Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru.” *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 19–36.